

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Banten 2015-2019

Muhammad Diaz Danindra^{1*}, Nunuk Triwahyuningtyas², Indri Arrafi Juliannisa³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

Email: muhammad.diaz@upnvj.ac.id¹, nunuk.triwahyuningtyas@upnvj.ac.id²,
indri.arrafi@upnvj.ac.id³

Artikel info

Artikel history

Diterima : 24-04-2022

Direvisi : 04-05-2022

Disetujui : 25-05-2022

Kata Kunci: tingkat pengangguran; indeks pembangunan manusia; upah minimum kabupaten/kota dan investasi

Keywords: *unemployment rate; human development index; district/city minimum wage and investment*

Abstrak

Permasalahan pengangguran yaitu suatu permasalahan yang selalu ada dalam proses pembangunan perekonomian suatu negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. penyumbang tingkat pengangguran terbesar di Indonesia salah satunya berada pada Provinsi Banten yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi selama 2015-2019. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap pengangguran. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data panel yang menggunakan pendekatan terbaik Fixed Effect Model. Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2015-2019. Pada hasil penelitian ini banyak perusahaan yang keluar dari wilayah Banten, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sedikit kecuali praktik calo yang menyebabkan pesaing tenaga kerja Banten kalah dengan tenaga kerja dari luar Banten. Kenaikan upah minimum berarti pekerja yang menganggur akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan kenaikan upah minimum juga dapat menjadi insentif bagi pekerja untuk lebih produktif. Sejumlah besar investasi masuk didominasi oleh investasi padat modal, sementara provinsi Banten memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dianggap kurang produktif, sehingga lebih sedikit tenaga kerja yang ditarik dari Provinsi Banten. Kesimpulannya variabel indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten variabel upah minimum mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten variabel investasi mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten.

Abstract

The problem of unemployment is a problem that always exists in the economic development process of a developing country, including Indonesia. One of the biggest contributors to the unemployment rate in Indonesia is Banten Province which has the highest number of unemployed during 2015-2019. The purpose of this study is to determine the effect of the human development index, minimum wage and investment on unemployment. This research was conducted by using panel data analysis method using the best approach Fixed Effect Model. This research uses Regency/City objects in Banten Province in 2015-2019. In the results of this study, many companies left the Banten area, so that there were only a few available job opportunities except for the practice of brokers which caused Banten's workforce competitors to lose out to workers from outside Banten. An increase in the minimum wage means that unemployed workers will look for work to meet their needs, and an increase in the minimum wage can also be an incentive for workers to be more productive. A large amount of incoming investment is dominated by capital-intensive investment, while Banten province has a low level of education and is considered less productive, so fewer workers are drawn from Banten province. In conclusion, the human development index variable has a positive relationship with the unemployment rate in Banten Province, the minimum wage variable has a negative relationship with the unemployment rate in

Banten Province, the investment variable has a positive relationship with the unemployment rate in Banten Province.

Koresponden author: Muhammad Diaz Danindra

Email: muhammad.diaz@upnvj.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Pengangguran diartikan sebagai keadaan masyarakat yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak ada pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan dan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan termasuk sebagai pengangguran (Soleh, 2017). Adapun dasar penelitian ini seperti yang dijelaskan dalam teori Keynes, yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh rendahnya permintaan umum secara keseluruhan yang disebabkan menurunnya pendapatan, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel yang menyebabkan produksi menurun dan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang menimbulkan pengangguran. Rendahnya pendapatan masyarakat dapat menunjukkan rendahnya nilai indeks pembangunan yang mengukur kualitas manusia (Sayifullah & Gandasari, 2016), sehingga produktivitas yang rendah yang ditandai dengan menurunnya nilai indeks pembangunan manusia sehingga tidak dibutuhkan oleh perusahaan dan mengakibatkan pengangguran terjadi. Kondisi yang tidak baik seperti ini mengakibatkan perusahaan akan menurunkan jumlah investasi modal yang dikeluarkan yang tentu saja menghambat jalannya industri dan tidak terbukanya lapangan pekerjaan yang baru sehingga akan selalu muncul masalah pengangguran (Suhendra & Wicaksono, 2020).

Tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten dengan membandingkan di wilayah sekitar di Pulau Jawa selama tahun 2015-2019 bahkan selama 4 tahun terakhir Provinsi Banten menempati posisi pertama pada tingkat nasional pengangguran. Provinsi Banten yang memiliki kualitas produktivitas manusia yang diukur berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selama tahun 2015-2019 menempati posisi tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan wilayah sekitar di Pulau Jawa. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ini beriringan bersama bersarnya upah minimum yang selalu meningkat (Yuningtyas, 2018). Diharapkan dapat membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif sehingga masyarakat yang ada di Provinsi Banten dapat memiliki taraf hidup yang layak serta menarik masyarakat menjadi lebih giat dalam mencari pekerjaan, selain itu investasi yang berada di Provinsi Banten juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi, dimana dengan tingkat investasi yang tinggi akan menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum bekerja dan akan menurunkan jumlah pengangguran yang ada.

Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada Pulau Jawa berada pada Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang datang berasal dari Pulau Jawa ataupun luar wilayah Provinsi Banten yang mencari pekerjaan di Provinsi Banten dan juga karena banyaknya praktik percaloan yang menjamin akan bekerja di perusahaan sehingga banyak

tenaga kerja lokal menjadi kalah bersaing ([Hasanuddin & Maulana, 2020](#)). Provinsi Banten yang memiliki jumlah masing-masing 4 Kabupaten dan Kota. Setiap kabupaten dan kota dalam Provinsi Banten tersebut memiliki tingkat pengangguran yang berbeda-beda seperti yang terlihat pada tabel 1:

Tabel 1.
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	10,22	8,3	9,67	8,33	8,71
Kab Lebak	10,74	8,88	8,88	7,69	8,05
Kab Serang	14,8	13	13	12,77	10,65
Kota Cilegon	12	11,8	11,88	9,33	9,68
Kota Tangerang Selatan	6,13	6,83	6,83	4,67	4,79
Provinsi Banten	9,55	8,92	9,28	8,52	8,11

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2019

Berdasarkan dari tabel 1 selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan jumlah pengangguran yang berada di Provinsi Banten dimana jumlah pengangguran pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0.36% dimana tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada 2016 sebesar 8.92% menjadi 9.28% pada tahun 2017. Pada Provinsi Banten jumlah pengangguran terbesar yang berada di tahun 2019 berada di Kabupaten Serang sebesar 10.65% dan kenaikan pengangguran tertinggi ada pada Kabupaten Lebak sebesar 0.36% dimana pada tahun 2019 menjadi 8.05% yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 7.69%, lalu peningkatan tingkat pengangguran terbesar berada pada Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 0.7% dimana jumlah pengangguran yang terjadi di tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 6.83% yang pada tahun sebelumnya 2015 sebesar 6.13%. Salah satu penyebab naiknya tingkat pengangguran di tahun 2019 yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perusahaan melakukan PHK masal sehingga tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan menjadi tidak mempunyai pekerjaan ([Fikri & Gopar, 2021](#)). Hal ini diperburuk dengan rendahnya tingkat kualitas manusia yang ada di Provinsi Banten yang menyebabkan kalahnya persaingan tenaga kerja yang datang dari luar wilayah Provinsi Banten sehingga meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

Keberhasilan dalam mencapai peningkatan kualitas manusia bisa diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator yang menandakan tercapainya kenaikan di bidang ekonomi, pendidikan serta Kesehatan ([Mahroji & Nurkhasanah, 2019](#)). Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Provinsi Banten yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir yang merupakan perkembangan yang meningkat pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2.
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2015-2019

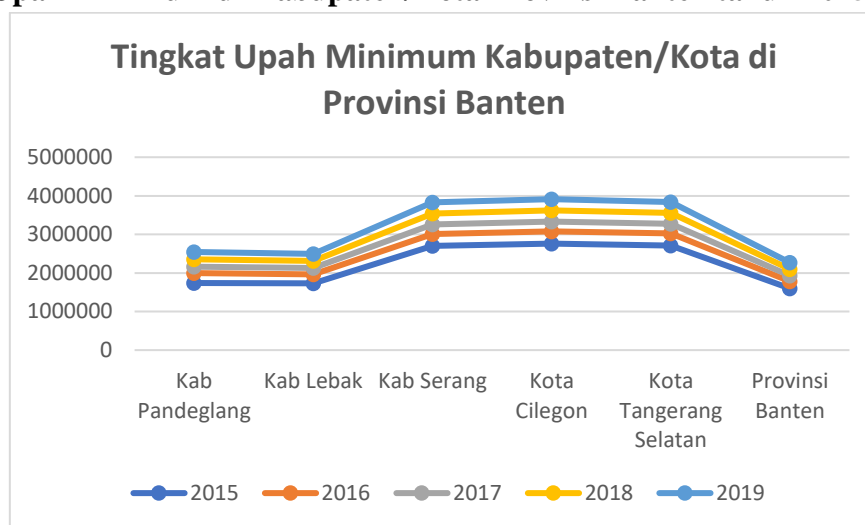
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	62,72	63,4	63,82	64,34	64,91
Kab Lebak	62,03	62,78	62,95	63,37	63,88
Kab Serang	64,61	65,12	65,6	65,93	66,38
Kota Cilegon	71,81	72,04	72,29	72,65	73,01
Kota Tangerang Selatan	79,38	80,11	80,84	81,17	81,48
Provinsi Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2019

Berdasarkan tabel 2 indeks pembangunan manusia pada Provinsi Banten pada tahun 2015-2019 cenderung terjadi peningkatan dengan IPM yang terjadi di tahun 2019 berada pada Kabupaten lebak sebesar 63.88 diikuti dengan Kabupaten Pandeglang sebesar 64.91 serta kenaikan IPM tertinggi pada tahun 2019 berada pada Kabupaten Serang sebesar 1.55 dengan tingkat IPM sebesar 66.38 pada tahun 2019. Meningkatnya tingkat indeks pembangunan manusia pada Provinsi Banten sebesar 0.46 di tahun 2017 tetapi tingkat pengangguran mengalami peningkatan di tahun yang sama pada Provinsi Banten sebesar 0.36% sehingga bertentangan dengan teori yang dijelaskan oleh Todaro yang menjelaskan bahwa rendahnya indeks pembangunan manusia berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran. Adapun hubungan indeks pembangunan manusia dengan jumlah tingkat pengangguran yaitu peningkatan kualitas manusia yang merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi. Keberhasilan peningkatan kualitas manusia bisa diukur berdasarkan masalah yang bisa teratasi terutama permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia yaitu pendidikan yang tidak tuntas, kemiskinan, pengangguran dan keberhasilan pembangunan kualitas manusia dari bidang ekonomi. Pencapaian tujuan pembangunan kualitas manusia yang digambarkan melalui tingkat indeks pembangunan manusia tentu sangat mengandalkan peran pemerintah yang berperan sebagai penyedia utama fasilitas pembangunan manusia. Peningkatan kualitas manusia yang ada tentu saja akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja dikarenakan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi (Sudarsana, 2016). Kegiatan seseorang dengan memilih tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan kegiatan investasi sekaligus biaya peluang (pilihan terbaik) dimana seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan bisa memiliki kesejahteraan yang lebih besar sebagai imbalan yang akan diterimanya (Juliannisa & Siswantini, 2020).

Upaya memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidupnya maupun keluarganya tenaga kerja sangat mengandalkan jumlah upah yang diberikan oleh perusahaan sebagai tenaga kerja yang bekerja. Tingginya tingkat upah yang ada menyebabkan besarnya biaya yang akan dihabiskan perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perkembangan upah minimum di Provinsi Banten tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan (Kuntiarti, 2018).

Gambar 1.
Tingkat Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2015-2019



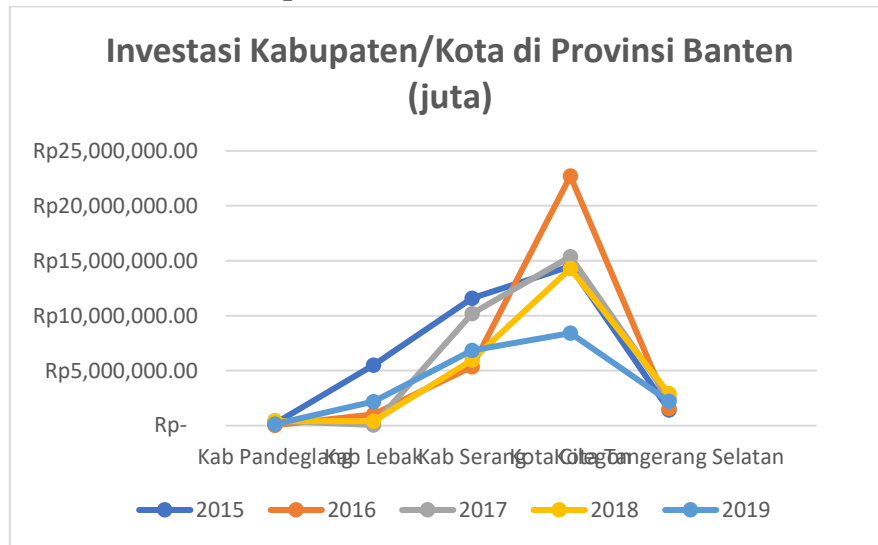
Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2019

Upah minimum yang berada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten di tahun 2015-2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang mempunyai jumlah upah minimum tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.913.078 yang ada di Kota Cilegon dan selanjutnya sebesar Rp 3.841.368 yang ada di Kota Tangerang Selatan. Meningkatnya upah Provinsi Banten pada tahun 2017 sebesar 8.25% tetapi kenaikan ini juga bersamaan dengan meningkatnya tingkat pengangguran pada tahun 2017 sebesar 0.36% sehingga tidak sejalan dengan teori keyness yang menjelaskan dengan semakin tinggi upah suatu daerah maka dapat menurunkan jumlah pengangguran. Penetapan jumlah upah yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja menyebabkan pengaruh tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Sehingga jumlah upah yang besar yang harus dibayarkan perusahaan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu wilayah ([Aruan & Sriyono, 2014](#)).

Permasalahan pengangguran juga berhubungan dengan tingkat investasi, hal yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Semacam mendorong tumbuhnya bisnis ataupun pendirian pabrik, serta adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk produksi ataupun permesinan serta menghasilkan lapangan pekerjaan ([Yunus, F., Rostin, & Rumbia, 2019](#)). Tingkat investasi di Provinsi Banten mengalami fluktuatif dapat dilihat pada gambar 2:

Gambar 2.

Tingkat Investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2019

Tingkat investasi pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dimana penurunan tingkat investasi secara signifikan berada pada Kota Cilegon pada tahun 2017-2019, dimana pada tahun 2018 tingkat investasi menurun sebesar Rp 1.081.152,67 dan penurunan tingkat investasi terbesar berada di Kota Cilegon pada tahun 2017 sebesar Rp 7.333.165,84. Penurunan jumlah investasi di Provinsi Banten sebesar Rp 7.791.974,09 atau sebesar 13.79% di tahun 2019 tetapi penurunan tersebut diikuti dengan menurunnya jumlah tingkat pengangguran yang berada di Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 0.41% sehingga bertentangan dengan teori keyness yang menjelaskan dimana semakin tinggi tingkat investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada begitu pula semakin menurunnya jumlah investasi semakin sedikit tenaga kerja yang terserap (Suparno, 2015). Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang tutup dan berpindah tempat dari Provinsi Banten ke luar daerah dengan tujuan untuk menghindari upah minimum yang dirasa terlalu tinggi pada Provinsi Banten. Hal ini salah satu yang menyebabkan kurangnya tertarik bagi investor yang dapat menanamkan modalnya di Provinsi Banten.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap pengangguran dengan memberikan wawasan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap pengangguran serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi yang akan berpengaruh terhadap pengangguran.

Metode Penelitian

Variabel dependen yang ada pada penelitian ini yaitu pengangguran terbuka dimana penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja, yang baru menyiapkan usaha kedepannya dan tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini periode waktu mulai tahun 2015-2019 yang dinyatakan dalam persen (%) per tahun. Variabel independen yaitu variabel yang akan dilihat apakah telah menjadi penyebab atas perubahan variabel dependen, terdapat tiga variabel independen yang ada di dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1), Upah Minimum (X2) dan Investasi (X3).

Tabel 3.
Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Rumus Perhitungan	Skala pengukuran
Pengangguran (Y)	Jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan	Angkatan Kerja Tidak Bekerja	Rasio
IPM (X1)	Kesehatan, pendidikan dan ekonomi	$IPM = \frac{1}{3}(X1+X2+X3)$	Rasio
Upah Minimum (X2)	Upah minimum yang diterima karyawan	Log Natural Upah Minimum	Rasio
Investasi (X3)	Realisasi PMA dan PMDN	Log Natural PMA + PMDN	Rasio

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2019

Pada penelitian ini digunakan jenis data sekunder, data yang didapatkan bersumber dari instansi lain dengan data yang ada ataupun yang sudah diolah dengan peneliti sebelumnya, berbentuk publikasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel pada tahun 2015-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui berasal Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang menggunakan data-data tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan investasi dari tahun 2015-2019. Populasi yaitu suatu objek yang mempunyai kepentingan tersendiri berdasarkan peneliti dan akan membuat kesimpulan dalam hasil penelitian ini. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu non probability sampling, dimana digunakan teknik sampling jenuh artinya sampel yang berada pada penelitian ini merupakan seluruh populasi pada penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian itu yaitu sebanyak 8 daerah, sehingga dalam penelitian ini mendapatkan jumlah sampel menjadi $5 \times 8 = 40$ data.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi data panel dengan penggabungan data cross section dengan time series, dimana alat untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *Eviews 10*. Uji asumsi klasik terlebih dimana diantaranya, uji nya sebagai berikut, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu dilakukan uji hipotesis untuk diketahui hasil pendugaan.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	1.290856
Probabilitas	0.524438

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Nilai probabilitas dalam penelitian ini sebesar 0.524438 lebih besar dari 0.05, sehingga data penelitian tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

	IPM	LN Upah	LN Investasi
IPM	1	0.6489101715964669	0.3636948797116619
LN Upah	0.6489101715964669	1	0.6710614021600479
LN Investasi	0.3636948797116619	0.6710614021600479	1

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Dalam pengujian *multikolinieritas* memiliki korelasi antar variabel kurang dari 0.8, dapat diartikan asumsi klasik pada uji *multikolinieritas* sudah terpenuhi.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson stat</i>	2.558497
<i>Prob</i>	0.00000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 6 nilai *Durbin-Watson* pada pengujian *autokorelasi* adalah 2.558497, sehingga harus dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson untuk melihat permasalahan *autokorelasi*. Hasil dalam penelitian ini $n=40$ serta $k=4$, $dL=1.3384$ dan $dU=1.6589$. Oleh karena itu nilai $4-dU (2.341) < d (2.558497) < 4-dL (2.6616)$ maka hasil uji *autokorelasi* ragu-ragu atau tidak dapat disimpulkan.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.140262	5.464021	-0.391701	0.6976
IPM	0.000363	0.012784	0.028394	0.9775
LNUpah	0.150932	0.429058	0.351775	0.7271

LNInvestasi	0.020224	0.048042	0.420973	0.6763
-------------	----------	----------	----------	--------

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 7 nilai probabilitas yang didapat dalam penelitian ini seluruh variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan pada asumsi klasik uji *heteroskedastisitas* tidak ada masalah.

Tabel 8.
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	17.363316	(7,29)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	65.878173	7	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 8 *Prob. Cross-section Chi-square* dalam penelitian ini yaitu 0.0000 menunjukkan lebih kecil dari 0.05, maka model terbaik menurut pengujian uji *chow* adalah *Fixed Effet Model (FEM)*.

Tabel 9.
Hasil Uji Hausmant

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	54.539292	3	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 9 *Prob. Cross-section random* dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.0000 kurang dari 0.05, maka dapat diartikan model *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan untuk penelitian ini.

Tabel 10.
Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	92.38720	12.65666	7.299491	0.0000
IPM	1.219587	0.476565	2.559120	0.0160
LNUpah	-11.77021	2.634672	-4.467429	0.0001
LNInvestasi	0.378946	0.139916	2.708377	0.0112

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 10 dengan mengetahui nilai t-tabel dalam penelitian ini dengan nilai $df = n-k$ maka mendapatkan nilai t-tabel sebesar 2.028094, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Pemabangan Manusia

Berdasarkan hasil regresi di atas, indeks pembangunan manusia memiliki t-hitung (2.559120) > t-tabel (2.028094). nilai probabilitas variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0.0160 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.0160 < 0.05), sehingga secara statistik variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.

2. Variabel Upah Minimum

Berdasarkan hasil regresi di atas, upah minimum memiliki t-hitung (4.467429) > t-tabel (2.028094). nilai probabilitas variabel upah minimum sebesar 0.0001 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0001 < 0.05$), sehingga secara statistik variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.

3. Variabel Investasi

Berdasarkan hasil regresi di atas, investasi memiliki t-hitung (2.708377) > t-tabel (2.028094). nilai probabilitas variabel investasi sebesar 0.0112 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0112 < 0.05$), sehingga secara statistik variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran.

Tabel 11.
Uji Simultan atau Uji F

<i>F-statistic</i>	42.38721
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 11 nilai f-tabel diketahui $N1 = k-1$ dan $N2 = n-k$ sehingga $N1 = 3$ dan $N2 = 36$ dengan mendapatkan hasil f-tabel sebesar 2.87, jika dibandingkan antara f-hitung maka f-hitung lebih besar dibanding f-tabel ($42.38721 > 2.87$). Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh variabel bebas yang ada di dalam penelitian ini memiliki pengaruh dengan variabel terikat yaitu tingkat pengangguran.

Tabel 12.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.935964
<i>Adjusted R-squared</i>	0.913883

Sumber: Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 12 diperoleh nilai *R-Squared* dan *Adjusted R-Squared* sebesar 0.935964 dan 0.913883 atau 93.59% dan 91.38%. hal ini mengindikasikan bahwa dari nilai *R-Square* variabel dependen bisa dijelaskan sebesar 93.59% oleh variabel independen, sementara itu sebesar 6.41% dapat dijelaskan dengan variabel lain dari penelitian ini dan pengujian dari *Adjusted R-Square* variabel dependen bisa dijelaskan sebesar 91.38% oleh variabel independen sementara itu sebesar 8.62% dapat dijelaskan dengan variabel lain dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil olah data yang sudah dilakukan sebelumnya maka didapatkan beberapa hasil yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015-2019, dimana dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menaikkan tingkat pengangguran

yang ada di Provinsi Banten. Hal ini terjadi karena selama lima tahun terakhir banyak perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten memiliki berpindah tempat ke luar Provinsi Banten untuk menghindari tingkat upah minimum yang dinilai terlalu besar yang mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang berada di Provinsi Banten sehingga banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja menjadi meningkatnya tingkat pengangguran.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Firdhanisa & Muslihatinningsih](#), 2017) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dimana dengan meningkatnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kemampuan penduduk akan semakin baik.

Dapat dilihat dari teori dan hasil penelitian yang ada dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan yang terjadi di keadaan sebenarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang setiap tahunnya meningkat tetapi kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga masih tingginya tingkat pengangguran yang ada.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten dimana dengan meningkatnya upah minimum menyebabkan penurunan terhadap tingkat pengangguran. Meningkatnya upah minimum di Provinsi Banten akan menyebabkan tenaga kerja yang bekerja menjadi lebih produktif lagi dan membuat perusahaan semakin berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Mankiw yang menjelaskan bahwa Peningkatan upah minimum diharapkan mampu memicu penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran khususnya pengangguran terdidik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Mahihody et al.](#), 2018) yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yaitu kenaikan tingkat upah berada di bawah titik keseimbangan dan meningkatnya upah minimum diduga akan mendorong para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dapat dijelaskan dengan teori dan penelitian terdahulu bahwa dengan meningkatnya upah minimum di suatu daerah akan memicu tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut.

3. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten dimana dengan adanya peningkatan jumlah investasi menyebabkan naiknya tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Banten. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan tenaga kerja yang berada di Provinsi Banten masih rendah sehingga dinilai kurang produktif di suatu perusahaan sehingga perusahaan memilih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Provinsi Banten untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Helvira & Rizki](#), 2020) yang menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran

dimana banyaknya investor yang lebih tertarik pada sektor padat modal untuk menanamkan modal pada industri-industri yang memiliki keuntungan besar sehingga kurangnya terserap tenaga kerja yang ada.

Perkembangan investasi di Provinsi Banten dapat dikatakan membaik dengan banyaknya investor yang masuk ke Provinsi Banten yang juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namun tidak diiringi dengan tenaga kerja yang berkualitas sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran yang ada.

Kesimpulan

Hasil pertama pada penelitian ini yaitu adanya pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan jumlah tingkat pengangguran dikarenakan pada Provinsi Banten banyak perusahaan yang keluar dari wilayah Provinsi Banten sehingga sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, selain itu adanya praktik calo yang menyebabkan kalahnya saingan tenaga kerja yang berada pada wilayah Provinsi Banten dengan tenaga kerja yang berasal diluar wilayah Provinsi Banten.

Hasil kedua pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh variabel upah minimum dengan jumlah tingkat pengangguran dikarenakan dengan meningkatnya tingkat upah minimum maka tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan kenaikan upah minimum juga dapat menjadi pendorong tenaga kerja untuk lebih produktif dalam bekerja.

Hasil ketiga pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh jumlah realisasi investasi dengan jumlah tingkat pengangguran yang berada pada Provinsi Banten dikarenakan banyaknya jumlah investasi yang masuk di domonasi oleh investasi padat modal dan kurangnya tingkat pendidikan di Provinsi Banten yang dianggap kurang produktif menyebabkan kurang terserap tenaga kerja yang berasal dari Provinsi Banten.

Bibliografi

- Aruan, N. L., & Sriyono, D. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011*. Modus, 26(2), 173–187. <https://doi.org/10.24002/modus.v26i2.587>
- Fikri, Y. T. A., & Gopar, I. A. (2021). *Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia*. Indonesian Journal of Business Analytics, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.19>
- Firdhania, R., & Muslihatinningsih, F. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 117–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4746>
- Hasanuddin, D. F. U. I. N. S. M., & Maulana, B. B. N. U. I. N. S. (2020). *Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Perempuan di Provinsi Banten*.
- Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). *Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat*. JIsEB, 1(1), 53–62.
- Juliannisa, I. A., & Siswantini, T. (2020). *Improving Human Development Index (HDI) by Illiteracy Eradication (case study in Cibadak Village)*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1784>
- Kuntiarti, D. D. (2018). *Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010-2015*. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 7(1), 1–9.
- Mahihody, A. Y., Engka, D. S. M., & Luntungan, A. Y. (2018). *Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(3).
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi-Qu, 9(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). *Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi-Qu, 6(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Soleh, A. (2017). *Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(2), 83–92.
- Sudarsana, I. K. (2016). *Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jurnal Penjaminan Mutu, 1(1), 1–14.
- Suhendra, I., & Wicaksono, B. H. (2020). *Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi-Qu, 6(1).
- Suparno, S. (2015). *Pengaruh Tingkat Upah Dan Nilai Output Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Besar Dan Sedang Di Indonesia Tahun 2000-2013*. Jurnal Ilmiah

Econosains, 13(2), 59–69. <https://doi.org/10.21009/econosains.0132.06>

Yuningtyas, A. V. (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Yunus, F., Rostin, & Rumbia, W. A. (2019). *Determinan Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (Pmdn) di Indonesia*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*,.